



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

Alamat : Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp. 0511-670166
Marabahan - Kabupaten Barito Kuala

Website : www.diskominfo.baritokualakab.go.id e-Mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan gambaran tentang program-program dan kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selama 1 (satu) tahun mendatang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2023-2026

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) ini.

Demikian, semoga Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang diperlukan.

Marabahan, 3 Februari 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA**



HERY SASMITA, S.STP, M.AP.
NIP. 19840220 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Rentra Renstra Dinas Komunikasi Dan Infomatika	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Infomatika	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas komunikasi dan Informatika	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ..	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika	37
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	53
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

		Ha l
<i>Tabel</i>	2.1. Perbandingan IKU Tahun 2024, 2025, 2026.....	6
<i>Tabel</i>	2.2. Tujuan, sasaran dan Indikator Renstra Dinas Kominfo.....	7
<i>Tabel</i>	2.3. Matriks Indikator Kinerja Utama	8
<i>Tabel</i>	2.4. Capaian IKU Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	9
<i>Tabel</i>	2.5. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Serta Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.....	10
<i>Tabel</i>	2.6. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala.....	20
<i>Tabel</i>	2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kab. Barito Kuala Tahun 2024	24
<i>Tabel</i>	2.8. Review terhadap rancangan awal RKPD 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	28
<i>Tabel</i>	2.9. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	34
<i>Tabel</i>	3.1. Keterkaitan Tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kab. Batola Tahun 2023-2026.....	36
<i>Tabel</i>	3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.....	38
<i>Tabel</i>	4.1. Rencana Program Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Kuala Tahun 2026.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 merupakan Implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah, dengan Mempedomani Rancangan Awal RKPD tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025. Renja PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada Tahun 2025 ini merupakan tahap RPD baru dan Renstra baru walaupun masih mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1213);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor (1308)
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berkahir pada Tahun 2022:
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35)
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031
21. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/ /KUM/2022 tetang Penetapan Rencana Strategis 2023 -2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026
23. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/ /KUM/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2026 Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Renncana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 adalah untuk :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026.
- Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Diskominfo sesuai aturan yang berlaku.

1.4. Sistematik Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Diskominfo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas
Komunikasi Dan Informatika

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026, tetap mengacu pada dokumen evaluasi pelaksanaan tahun – tahun sebelumnya. Dibawah ini kami sajikan tabel perbandingan IKU 2022 – 2024, dimana ada reviu kedua IKU dan Renstra oleh Tim SAKIP Kabupaten Barito Kuala terlihat pada Tabel 2.1 .

Tabel 2.1
Perbandingan IKU Tahun 2024, 2025 dan 2026

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		
2024	2025	2026	2024	2025	2025
Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan	Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan	Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan	Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan
Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan Domain SPBE	Persentase Pengelolaan Domain SPBE	Persentase Pengelolaan Domain SPBE
Meningkatnya Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Meningkatnya Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian pelakuan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Rencana strategis (renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 - 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 4 tahun, menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. RENSTRA

tersebut juga merupakan panduan Bappelitbang selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan dalam menjalankan amanah pimpinan. Hasil pengukuran indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 berdasarkan Reviu Renstra ke tiga adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan
Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE
		Meningkatnya Pembangunan Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik Sektor
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo

Tabel 2.3
Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase Informasi Dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan	Jumlah informasi dan komunikasi yang dipublikasikan _____ x 100% Jumlah Informasi dan komunikasi yang dikelola	Informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan" adalah informasi dan komunikasi yang memenuhi kriteria akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap serta telah melalui SOP yang telah dipublikasikan melalui media internal dan media kerjasama	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Laporan Kegiatan (kliping berita)
Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan Domain SPBE	Nilai Domain SPBE yang dikelola -----x 100% Bobot Nilai Domain SPBE yang dikelola	Pengelolaan Domain SPBE" yaitu Pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE dengan nilai hasil pelaksanaan Pengelolaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah ditetapkan oleh KemenpanRB	Bidang Layanan E-Government	Laporan hasil evaluasi SPBE
		Meningkatnya Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral" adalah hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah	Bidang Statistik dan Persandian	Hasil evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai hasil evaluasi SAKIP Diskominfo Tahun n	Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di Diskominfo yang dikeluarkan oleh Inspektorat	LHE Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Barito
KualaTahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realiasi	Persentase	Krtiteria Kode
Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persen	100%	100%	100%	Sangat Baik
Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan Domain SPBE	Persen	88%	85.42%	97.07%	Sangat Baik
Meningkatnya Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Satistik Sektoral	Nilai Indeks	1.7	2.31	136%	Sangat Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai Evaluasi SAKIP Diskominfo	70.93	70.07	98.79%	Sangat Baik

Dari tabel di atas capaian dari IKU 1 “Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan” dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%, dengan capaian 100%, capaian IKU ini mencapai target 100%, selanjutnya IKU 2 “Persentase Pengelolaan Domain SPBE” dengan realisasi sebesar 85.42% dari target 88%, atau dengan capaian 97.07%, IKU 3 “Indeks Pembangunan Statistik Sektoral” terealisasi sebesar 2.31 atau 136% dari target 1.7, IKU ini melebihi target karena meningkatnya kualitas data statistik sektoral, sedangkan IKU 4 “Nilai Evaluasi SAKIP Diskominfo” dengan terealisasi sebesar 70.07 atau 98.79% dari target sebesar 70.93 IKU ini tidak tercapai sesuai Target karena hasil dari evaluasi SAKIP ada beberapa dokumen SAKIP yang harus diperbaiki. Namun untuk capaian secara keseluruhan IKU di atas 90% sehingga termasuk kriteria sangat baik

Selanjutnya Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Sasaran dan Indikator Kinerja Program Serta Kinerja Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Kegiatan
Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkualitas	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	Persentase pengelolaan DomainKebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Domain Layanan SPBE	Persentase Infrastruktur SPBE yang baik	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase Pengelola keamanan informasi pemerintah daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	Nilai SAKIP Diskominfo	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan IV tahun berkenaan dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan dengan baik dan ada yang telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan dan ada juga yang belum memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek serapan/realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Triwulan IV (bulan Desember) Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis 2024 dianggarkan sebesar Rp. 9,521,006,647,- dengan realisasi sebesar Rp. 8,905,328,928,- dengan capaian 93.53%.

Komposisi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 (s/d bulan Desember)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	3.338.673.275.00	2.911.729.479.00	87.21
2.	Belanja Langsung	6,182,333,372.00	5,993,599,449.00	96,59
Jumlah		9,521,006,647.00	8,905,328,928.00	93.53

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan IV (bulan Desember) Tahun 2024 berdasarkan target Indikator kineja program dan kegiatan antara lain :

- A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Daerah) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 2.911.729.479,00 atau (87.21%) dari pagu sebesar Rp. 3.338.673.275.00
- B. Belanja Langsung
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pagu Rp. 1,202,912,490.00 ,- telah terealisasi sebesar Rp. 1,160,663,321.00 atau (96.49%) realisasi sampai dengan triwulan IV 2024. Program ini memiliki 5 kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 31,472,450.00 telah terealisasi sebesar Rp.31,408,413.00,- atau (99.80%). Kegiatan ini memiliki sub kegiatan :

- a) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dengan pagu Rp. 31,472,450.00 dan target capaian 17 laporan, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 31,408,413.00 atau (90,80%). dan realisasi fisik sebesar 17 Laporan atau (100%)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp.20,238,000.00 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 15,937,840.00 atau (78.75%),-. Kegiatan ini memiliki sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan pagu Rp. 20,238,000.00 dan target capaian 12 laporan, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 15,937,840.00 atau (78.75%) dan realisasi fisik 12 laporan atau (100%).
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 292,198,940.00 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 290,407,832.00 atau (99,39%), Kegiatan ini memiliki sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu Rp. 4,368,930.00,-dan target 20 paket,memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 4,361,250.00 atau 99.82% dan realisasi fisik 20 paket atau (100%)
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu Rp. 22,799,700.00 dan target 25 jenis, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 22,674,300.00 atau (99.45%) dan realisasi fisik 25 Jenis atau (100%)
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor dengan pagu Rp. 57,375,000.00 dan target 6675 paket, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 56,525,000.00 (98,52%) dan realisasi fisik 6675 paket atau (100%)
 - d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan pagu Rp. 10,139,310.00 target 7700 paket, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 10,138,470.00 atau (99,99%) dan realisasi fisik 7700 paket atau (100%)
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu Rp. 197,516,000.00 target 40 laporan, memiliki,- realisasi keuangan Rp. 196,708,812.00 atau (100%) dan realisasi fisik 40 laporan atau (100%)
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu Rp. 118,652,900.00 telah realisasi

keuangan sebesar Rp. 118,352,500.00 atau (99.75%),-, Kegiatan ini memiliki sub kegiatan :

- a) Pengadaan Mebel dengan pagu Rp. 41,257,500.00 target 38 unit, memiliki,- realisasi keuangan Rp. 41,257,500.00 atau (100%) dan realisasi fisik 38 unit atau (100%)
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp. 77,395,400.00 target 6 unit, memiliki,- realisasi keuangan Rp. 77,095,000.00 atau (99.61%) dan realisasi fisik 6 unit atau (100%)
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu Rp. 112,824,750.00 telah realisasi keuangan sebesar Rp. 106,027,253.00 atau (93.98%),-, Kegiatan ini memiliki sub kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu Rp. 27,775,000.00 dengan target 12 laporan memiliki realisasi keuangan Rp. 25,220,000.00 atau (90.80%) dan realisasi fisik 12 laporan atau (100%)
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu Rp. 69,460,000.00 dengan target 12 laporan yang memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 66,398,553.00 atau (95.59%) dan realisasi fisik 12 laporan atau (100%)
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu Rp. 15,589,750.00 dengan target 12 laporan yang memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 14,408,700.00 atau (92.42%) dan realisasi fisik 12 laporan atau (100%)
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu Rp. 598,607,200.00 telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 565,313,905.00 atau (94.44%). Kegiatan ini memiliki sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu Rp. 146,437,200.00 target 17 unit, memiliki realisasi keuangan Rp. 113,603,273.00 atau (77.58 %) dan realisasi fisik 17 unit atau (100%)
 - b. Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu Rp. 426,470,000.00 target 1 unit gedung kantor,

memiliki realisasi keuangan Rp. 426,010,632.00 atau (99,89%), dan realisasi fisik 1 unit gedung kantor atau (100%)

- c. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu Rp. 25,700,000.00 target 9 jenis, memiliki relisasi keuangan Rp. 25,700,000.00 atau (100%) dan realisasi fisik 9 jenis (100%)

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu Rp. 1,690,446,057.00 telah terealisasi sebesar Rp. 1,674,928,559.00 atau (99.08%) realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024. Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota dengan pagu Rp. 1,690,446,057.00 telah terealisasi sebesar Rp. 1,674,928,559.00 atau (99,08%) realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024. Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan yaitu :
 - a) Pengelolaan konten dan Perencanaan media komunikasi publik dengan pagu Rp. 378,307,747.00 dan target capaian 12 Laporan, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 371,741,800.00 atau (98.26) dan realisasi fisik 12 Laporan atau (100%).
 - b) Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan pagu Rp. 200,300,000.00 dan target capaian 12 laporan, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 191,475,659.00 (95.59%) dan realisasi fisik 12 Laporan atau (100%).
 - c) Pelayanan Informasi Publik dengan pagu Rp1,063,638,310.00 dan target capaian 12 Laporan, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 1,063,511,100.00 atau (99.99%) dan realisasi fisik 12 laporan atau 100%
 - d) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dengan pagu Rp. 48,200,000.00 dan target capaian 201 orang memiliki realisasi keuangan Rp. 48,200,000.00 atau (100%) dan realisasi fisik 201 orang atau (100%).

- 3. Program Aplikasi Informasi Informatika dengan pagu Rp. 3,045,740,475.00 telah terealisasi sebesar Rp. 2,929,739,879.00 atau (96.19%) realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024. Program ini memiliki 2 kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 143,000,000.00 dan memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 137,960,000.00 atau (96.48%). Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :
 - a) Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pagu Rp. 143,000,000.00 dan target capaian 54 Dokumen realisasi keuangan sebesar Rp. 137,960,000.00 atau (96.48%) dan realisasi fisik 54 Dokumen atau 100%
- b. Kegiatan E-Government Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 2,902,740,475.00 dan memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 2,791,779,879.00 atau (96.18%). Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp. 1,993,620,975.00 dan target capaian 1 unit dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,993,575,779.00 atau (99.99%) dan realisasi fisik 1 unit atau (100 %).
 - b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pagu Rp. 168,672,500.00 dan target capaian 3 unit dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 168,637,600.00 atau (99.98%) dan realisasi fisik 3 unit atau (100%)
 - c. Pengelolaan E-Government Chief information Officer (GCIO) dengan pagu sebesar Rp. 740,447,000.00 dan target 4 Dokumen memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 629,566,500.00 atau (85.03%) dan realisasi fisik 4 Dokumen (100%)
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Pagu Rp. 95,775,850.00 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 86,684,800.00 atau (90,91%) memiliki 1 Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 95,775,850.00 dan target capaian 70%, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. . 86,684,800.00 atau (90.91%) dan realisasi fisik 70% atau dengan capaian (100%) memiliki 2 sub kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Sektoral dengan pagu Rp. 69,123,750.00 dan target capaian 12 Dokumen, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 65,573,200.00 atau (94.86%) dan realisasi fisik 12 Dokumen (100%)
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan pagu Rp. 26,652,100.00 dan target capaian 40 orang, memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 21,111,600.00 atau (79.21%) dan realisasi fisik 40 Orang (100%)
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan pagu Rp. 127,220,500.00 dan target 74% memiliki realisasi Rp. 125,645,050.00 atau (94.86%) dan realisasi fisik 100% atau (135%). Program ini memiliki 2 kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 56,649,250.00 dan target 74% dengan realisasi fisik 78% atau (100%), memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 56,649,250.00 atau (99.74%). Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :
 - a) Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pagu Rp. 56,649,250.00 dan target capaian 4 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 56,649,250.00 atau (99.74%) dan realisasi fisik 4 laporan atau (100%).
 - 2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 70,421,250.00 dan target 74% dengan realisasi fisik 74% atau (100%), memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 68,995,800.00 atau (97.98%). Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp70,421,250.00 target capaian 4 perangkat daerah dengan realisasi Rp. 68,995,800.00 atau (97.98%). dan realisasi fisik 4 perangkat daerah atau (100%)

C. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

1. Program Aplikasi Informatika
 - a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

D. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD).
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas, operasional atau lapangan, sub kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor

dan bangunan lainnya dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah/Kota dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b) Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - c) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - d) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan :
 1. Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a) Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - b) Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c) Sub kegiatan Pengelolaan E-Government Chief information Officer (GCIO)
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan kegiatan :
 1. Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektorial)
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :
 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

E. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

1. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD pencapaian Renstra PD di tahun 2024 dan perkiraan target dan realisasi tahun 2024 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra SKPD 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (T-C.29)
Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan Tahun 2024)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (tahun-2)			Target program / kegiatan (Renja PD tahun berjalan 2025 (n-1)	Perkiraan realisasi target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Catatan
					Target renja PD tahun 2024 (n-2)	Realisasi renja PD tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu		13							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	100%		100%	100%	100%	100%	200%	0.5	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	12	12	12	12	12	12	36	9	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	17	17	17	100.00	12	46	11.5	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	12	12	12	12	100.00	12	36	9	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	312	336	289	92.63	336	937	234.25	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	1	12	12	100.00	12	25	6.25	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	50.00	100%	3	0.75	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	6	4	4	66.67	5	15	3.75	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	1.00	100%	3	0.75	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	7	20	20	285.71	7	34	8.5	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23	23	25	25	100.00	27	75	18.75	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	700	5,325	6,675	6,675	100.00	6,675	18675	4668.75	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7800	7,675	7,700	7,700	100.00	7,700	23075	5768.75	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	16	40	40	100.00	40	96	24	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	47	6	44	44	100.00	35	85	21.25	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42		38	38	100.00	29	67	16.75	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	6	6	6	100.00	6	18	4.5	

	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	0.75	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100.00	12	36	9	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	0.75	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	13	17	17	100.00	17	47	11.75	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	1	1	1	100.00	1	3	0.75	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	32	9	9	100.00	9	50	12.5	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	100	100	100	100	100			0	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	100%	100%	100	100	100			0	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		12	12	12	100	-	24	6	
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	240				#DIV/0!	240	240	60	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Media Publik		12	12	12	100	-	24	6	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	363				#DIV/0!	363	363	91	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		12	12	12	100	-	24	6	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	201				#DIV/0!	240	240	60	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		60	201	201	100	-	261	65.25	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	5		-	-	#DIV/0!	5	5	1	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		1	0	0	#DIV/0!	0	1	0.25	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Domain Layanan SPBE (persen)		82			85.42			0	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Domain tata Kelola SPBE, Domain Layanan SPBE dan Domain (persen)	100%		88.00	85.53	97.19	93	938553%	2346.3825	

	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif	100	92	93	85	91	95	272	68	
	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75	11	54	54	100	75	140	35	
	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur SPBE yang baik	75	60	65	65	100	70	195	48.75	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola	1	1	1	1	100	0	2	0.5	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1				#DIV/0!	1	1	0.25	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3	3	3	3	100	3	9	2.25	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4	4	4	4	100	4	12	3	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	100	100	100	100.00%	100.00%	4	105	26.25	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	12	12	12	12	100	12	36	9	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5				#DIV/0!	5	5	1.25	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2.8	1.66	1.7	2.3	135.29	2.6	6.56	1.64	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statisitik sektoral daerah		11						0	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi	85		70%	70%	100%	80%	150.0%	0.375	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1	12	12	100		13	3.25	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	12				#DIV/0!		80	20	
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	40	47	40	40	100		127	31.75	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian	100	64	74	100.00%	1.35%	85.00	150.00	37.5	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	100	80	74.00%	74.00%	100.00%	85.00	165.74	41.435	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	2	4	4	100	4	10	2.5	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	100	6.38	74.00%	74.00%	100.00%	85.11	92.23	23.06	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	47	4	4	47	47	47	98	24.5	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini dijelaskan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Tahun 2023 adalah :
 1. Persentase Jumlah informasi yang berkualitas
 2. Domain Layanan SPBE ditargetkan
 3. Nilai Evaluasi SAKIP Diskominfo
- b. Tahun 2024 adalah :
 1. Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan
 2. Persentase Pengelolaan domain SPBE
 3. Indeks Pembangunan Statistik Sektoral
 4. Nilai SAKIP Diskominfo
- c. Tahun 2025 adalah :
 1. Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan
 2. Persentase Pengelolaan domain SPBE
 3. Indeks Pembangunan Statistik Sektoral
 4. Nilai SAKIP Diskominfo
- d. Tahun 2026 adalah :
 1. Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan
 2. Persentase Pengelolaan domain SPBE
 3. Indeks Pembangunan Statistik Sektoral
 4. Nilai SAKIP Diskominfo

Sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 terdapatnya Indikator yang tidak smart serta target yang tidak sesuai sehingga harus dilaksanakan perubahan IKU pada tahun 2024

Kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.7 (T-C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Rentra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (th n)	Tahun 2025 (thn+1)	Tahun 2026 (thn+1)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (th n)	Tahun 2026 (thn+1)	
1	2	3	4	7	8	6	6	10	10	11	12	13
1	Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan				100%	-	-		100%	100%	100%	
2	Persentase Pengelolaan Domain SPBE				88%	-	-		85.42%	93%	100%	
3	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral				1.7				2.31	2.6	2.8	
4	Nilai SAKIP Diskominfo			68.91	70.93	-	-	63.23	70.07	72.99	74.99	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi

Transparansi dan good governance adalah tujuan dari pelayanan Komunikasi dan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat, di bidang komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas ke pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Dalam hal ini dinas komunikasi dan informatika sesuai dengan tupoksinya melaksanakan kegiatan dalam upaya mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi dengan meningkatkan informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan

2. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saat ini lebih dikenal sebagai *e-government* yang berdampak pada integrasi sistem dengan tujuan implementasi SPBE yang terpadu untuk mencapai pelayanan publik dan birokrasi yang berkinerja tinggi dalam upaya memajukan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih luas, serta menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang berupa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan SPBE. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan Penyelenggaraan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan pelaksanaan pengelolaan SPBE dan pembangunan statistik sektoral

3. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan penilaian dari KempanRB, Dinas komunikasi dan informatika melaksanakan kegiatan dalam upaya mendukung peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Diskominfo

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan

e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank spot serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Barito Kuala;
2. Belum terbentuknya kepemimpinan digital (e-leadership) bagi pimpinan daerah dan pimpinan SKPD;
3. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan e-Government;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas dan kuantitas;
5. Belum terintegrasinya pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
6. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government dan belum optimal koordinasi kelembagaan.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai sasaran RPD, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

b. Dampak isu – isu strategis terhadap sasaran RPD dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang kominfo, yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi e-government maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat informasi Indonesia.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang handal, sehingga pelayanan informasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan masyarakat kurang optimal;
2. Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna;
3. Belum optimalnya ketersediaan data sektoral yang memenuhi standar rekomendasi BPS;
4. Kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan keamanan informasi dan infrastruktur;
5. Kurang optimalnya penggunaan website serta kepedulian SKPD terhadap keterbukaan informasi publik;
6. Perlunya peningkatan pengintegrasian pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui media center (MC)

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dari tantangan tersebut adalah :

1. Adanya regulasi terkait pelaksanaan urusan kominfo, statistik dan persandian
2. Adanya peluang peningkatan kapasitas SDM untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang teknologi informasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Barito Kuala dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
3. Adanya peluang untuk meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala.

d. Formulasi isi-isu penting dan rekomendasi

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal –hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

1. Perlunya mengikutsertakan PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang Teknologi Informasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Barito Kuala dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala;
3. Perlunya pembentukan kepemimpinan digital (e-leadership) bagi pimpinan daerah dan pimpinan SKPD;
4. Perlunya pengintegrasian pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
5. Perlunya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government dan belum optimal koordinasi kelembagaan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.8 ini disajikan perbandingan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan, dimana untuk pencapaian kinerja diperkirakan belum mencapai 100%, karena pelaksanaan kegiatan 2026 masih belum berjalan/ dilaksanakan, jadi kami susun hanya berupa perkiraan/proyeksi.

Tabel 2.8 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo		3,369,797,271.00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	100 Persen	4,822,632,473.00
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	Dokumen	13,200,000.00	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	12 Dokumen	107,393,500.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Batola	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13,200,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Batola	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	102,393,500.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Batola	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Batola	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,000,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Laporan	3,086,497,271.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	12 Laporan	3,162,375,771.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Batola	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/Bulan	3,073,297,271.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Batola	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/Bulan	3,073,297,271.00
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Batola	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	13,200,000.00	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Batola	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	89,078,500.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian	Persen	3,324,087.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian	100%	123,207,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Batola	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1,324,087.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Batola	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	48,069,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Batola	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.000.000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Batola	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	27,069,000.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Batola	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Batola	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	48,069,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	55,925,910.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen	416,744,077.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Batola	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	500,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Batola	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2,154,090.00
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab.Batola	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.000.000.00	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab.Batola	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	17,932,250.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Batola	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 Paket	10.000.000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Batola	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6275 Paket	42,375,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Batola	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2000 Paket	1.000.000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Batola	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7700 Paket	5,304,100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Batola	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	43,925,910.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Batola	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	351,132,727.00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	3.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah	27 Unit	201,782,350.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Batola	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Batola	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50,000,000.00
Pengadaan Mebel	Kab.Batola	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1.00	Pengadaan Mebel	Kab.Batola	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	9,791,550.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Batola	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Batola	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	141,990,800.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	155,850,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Batola	Persentase realisasi pembayaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	171,611,775.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Batola	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	13,400,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Batola	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Batola	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	129,050,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Batola	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129,050,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Batola	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13,400,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Batola	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15,561,775.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen	55,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen	639,518,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Batola	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	50,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Batola	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	99,148,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Batola	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Batola	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	23,900,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Batola	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	3,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Batola	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	16,470,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Batola	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Batola	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500,000,000.00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	Persen	2,199,137,700.00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	Persen	3,898,403,388.00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah informasi dan komunikasi yang dikelola	Jumlah	2,199,137,700.00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah informasi dan komunikasi yang dikelola	Jumlah	3,898,403,388.00

Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab.Batola	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	201 Komunitas	80,675,000.00	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab.Batola	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	201 Komunitas	115,362,190.00
Pelayanan Informasi Publik	Kab.Batola	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	120 Permohonan	59,014,224.00	Pelayanan Informasi Publik	Kab.Batola	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	120 Permohonan	59,014,224.00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab.Batola	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	263 Media	1,643,559,252.00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab.Batola	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	400	3,308,137,750.00
Penyusunan Konten	Kab.Batola	Jumlah Konten Informasi Publik	240 Konten	349,589,824.00	Penyusunan Konten	Kab.Batola	Jumlah Konten Informasi Publik	240 Konten	349,589,824.00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab.Batola	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	4 Orang	66,299,400.00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab.Batola	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	4 orang	66,299,400.00
Program Aplikasi Informatika		Persentase pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	Persen	1,831,021,679.00	Program Aplikasi Informatika		Persentase pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	100 Persen	3,738,000,000.00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota		Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif	Persen	-	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota		Persentase jumlah domain dan sub domain Pemerintah Daerah yang aktif	Persen	115,000,000.00
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab.Batola	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab.Batola	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	78 Dokumen	115,000,000.00
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Persen	1,831,021,679.00	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Infrastruktur SPBE yang berfungsi dengan baik	Persen	3,623,000,000.00
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab.Batola	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab.Batola	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	66,000,000.00
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab.Batola	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	396,000,000.00	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab.Batola	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	203,300,000.00
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab.Batola	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab.Batola	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	47 Perangkat Daerah	362,960,000.00
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab.Batola	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi		Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab.Batola	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 Aplikasi	153,900,000.00

Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab.Batola	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab.Batola	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	164,040,000.00
Penyediaan Akses Internet	Kab.Batola	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	47 Perangkat Daerah	1,435,021,679.00	Penyediaan Akses Internet	Kab.Batola	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	47 Perangkat Daerah	2,672,800,000.00
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab.Batola	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen		Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab.Batola	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Persen	3,000,000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Layanan Administrasi Diskominfo	Persen	6,000,000.00
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	Dokumen	3,000,000.00	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disampaikan tepat waktu	Dokumen	6,000,000.00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Batola	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	3,000,000.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab.Batola	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	6,000,000.00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks	170,041,106.00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2.8 Indeks	220,953,050.00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi	Persen	170,041,106.00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data statistik sektoral yang layak publikasi	Persen	220,953,050.00
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab.Batola	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persen	30,000,000.00	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab.Batola	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persen	65,735,750.00
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab.Batola	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	40,000,000.00	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab.Batola	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	23,080,000.00
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab.Batola	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Persen	30,000,000.00	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab.Batola	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Persen	23,080,000.00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab.Batola	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	30 Orang	30,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab.Batola	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	78,097,300.00
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab.Batola	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persen	40,041,106.00	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab.Batola	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persen	30,960,000.00

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	207,961,705.00	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	314,608,550.00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelola keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	157,961,705.00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengelola keamanan informasi pemerintah daerah	Persen	282,954,800.00
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab.Batola	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	20,000,000.00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab.Batola	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	107,279,350.00
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab.Batola	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	97,961,705.00	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab.Batola	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	96,215,200.00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab.Batola	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	47 Perangkat Daerah	20,000,000.00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab.Batola	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	47 Perangkat Daerah	46,086,500.00
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab.Batola	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	20,000,000.00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab.Batola	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	33,373,750.00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	Persen	50,000,000.00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keamanan Informasi	Persen	31,653,750.00
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab.Batola	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	50,000,000.00	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab.Batola	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	31,653,750.00
				7,780,959,461.00					13,000,597,461.00

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diperoleh dari

1. Usulan Musrenbang baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten
2. Usulan masyarakat berupa proposal baik yang melalui Pimpinan Daerah (Kepala Daerah), SKPD dan yang langsung menyerahkan ke kantor
3. Hasil rapat kerja bersama DPRD Kabupaten Barito Kuala

Untuk Tahun Anggaran 2026, usulan program dan kegiatan dari masyarakat (melalui ketiga cara di atas) belum ada.

Tabel. 2.9 (T-C 32)

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<i>NIHIL</i>				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok tanah air, sebagai langkah strategis untuk menghapus kesenjangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini diiringi dengan digitalisasi data untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi landasan pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Di sektor ekonomi, digitalisasi menjadi fokus utama untuk mendukung kemandirian bangsa, terutama dengan meningkatkan inovasi teknologi seperti pertanian digital dan platform pembiayaan bagi UMKM.

Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan sumberdaya manusia unggul melalui program literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta industri. Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya Indonesia secara global, menjaga identitas nasional, dan menciptakan ekosistem digital yang kompetitif. Melalui visi ini, Kabinet Merah Putih menegaskan komitmennya menjadikan digitalisasi sebagai motor penggerak kemandirian bangsa di era digital melalui program transformasi sesuai Asta Cita. Dalam konteks ini, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan Digital dengan Visi Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut di atas yaitu :

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas"

Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita yang meliputi yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Secara khusus untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan perkotaan, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk memberikan kontribusi melalui penyiapan dan penyediaan infrastruktur Komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan SKPD	Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Program
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	$\frac{\text{Jumlah informasi dan komunikasi yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah Informasi dan komunikasi yang dikelola}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	$\frac{\text{Jumlah Nilai Domain SPBE yang dikelola}}{\text{Jumlah Bobot Nilai Domain SPBE yang dikelola}} \times 100\%$	Program Aplikasi Informatika
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				Meningkatnya Pembangunan Statistik Sektoral	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai hasil evaluasi SAKIP Diskominfo Tahun n	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
---	--	--	--	---	---	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Keberhasilan pembangunan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan perubahan kearah perbaikam sistem pembinaan dan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran menatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan misi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026, selaras dengan arah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dalam mewujudkan visi dan misi.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang di inginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi
2. Meningkatkan Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan ke dalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dari

setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan dengan Indikator Persentase informasi dan Komunikasi Pemerintah yang Dipublikasikan
2. Meningkatkan Pelaksanaan Pengelolaan SPBE dengan Indikator Persentase Pengelolaan Domain SPBE
3. Meningkatkan Pembangunan Statistik Sektoral dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik Sektoral
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan indikator Nilai SAKIP Diskominfo

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Jumlah informasi dan komunikasi yang dipublikasikan ----- x 100% Jumlah Informasi dan komunikasi yang dikelola	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Indeks SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan Domain SPBE	Jumlah Nilai Domain SPBE yang dikelola ----- x 100% Jumlah Bobot Nilai Domain SPBE yang dikelola	84%	87%	93%	100%
			Meningkatnya Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	1.5	1.7	2.6	2.8
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai hasil evaluasi SAKIP Diskominfo Tahun n	68,91 Nilai Sakip	70,91 Nilai Sakip	72,99 Nilai Sakip	74,99 Nilai Sakip

3.2.3 Sasaran dan Arah Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi diarahkan bagi peningkatan mutu pelayanan timbal balik dan arus informasi kepada dan dari masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kebijakan untuk mencapai sasaran adalah:

1. Pengelolaan media center (website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online, kerjasama media) pembuatan konten, pengelolaan layanan penganduan, pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi publik, sosialisasi internet sehat, Rakor/FGD, Jemput Bola Pengaduan Masyarakat
2. Pengembangan, implementasi, dan pengelolaan SPBE, termasuk keamanan, privasi, akses, pengelolaan data, integrasi, pengembangan kapasitas, pengawasan, kerja sama, dan penilaian
3. Pengembangan, implementasi, dan pengelolaan SPBE, termasuk strategi, organisasi, teknologi, data, keamanan, privasi, akses, integrasi, pengawasan, dan penilaian.
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, inprastruktur SPBE, penyediaan tenaga ahli
5. TIK, pengadaan dan pengembangan aplikasi, Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rapat Koordinasi, peningkatan SDM dan pengadaan sarana
6. Pengadaan sarana prasarana persandian, fasilitasi layanan persandian, Peningkatan kualitas SDM Persandian
7. Pengadaan sarana prasarana persandian, Peningkatan kualitas SDM Persandian
8. Koordinasi dan sinkronisasi Statistik Sektoral, Diseminasi statistik sektoral, Peningkatan Kualitas SDM Statitik Sektoral, Fasilitasi kegiatan Statistik Sektoral
9. Membuat Perencanaan serta Reviu renstra, pohon kinerja, matrik keselarasan kinerja/ cascading, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja, SKP Kinerja Individu
10. Membuat laporan kinerja instansi SKPD, membuat rencana aksi perbaikan SAKIP
11. Membuat Laporan Monitoring evaluasi (monev) atas rencana aksi secara periodik baik bulanan maupun triwulan, matrik tindak lanjut atas rencana aksi perbaikan rencana aksi perbaikan sakiP
12. Menetapkan dokumen IKU, membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja, SOP Pengukuran Kinerja, Laporan pengukuran Kinerja (bulanan dan triwulan), laporan bulanan ekin individu
13. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja (penyediaan

komponen listrik/ penerangan, ATK, Cetak, logistik, bahan bacaan, mebel, peralatan mesin lainnya, kendaraan dinas operasional, jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jasa pelayanan umum kantor, jasa pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan sarana prasarana gedung/kantor, pemeliharaan rehabilitasi gedung/kantor) serta melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026. Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 5 program yang dirumuskan dalam rencana kerja Tahun 2026 yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD

Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan dokumen perencanaan serta dokumen pelaporan / evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (Renstra, Renja, Laporan Triwulanan, Laporan Kinerja Tahunan, LKIP, PK

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan pengumpulan data statistik sektoral daerah pada dinas kominfo untuk mendukung Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan melaksanakan kegiatan rapat

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini mengakomodir belanja Gaji dan Tunjangan, serta TPP ASN Diskominfo selama 1 tahun

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Sub Kegiatan ini mengakomodir Penyusunan laporan keuangan, RFK bulanan maupun triwulan

3. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

- a. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sub Kegiatan ini mengakomodir penyediaan ATK untuk

pendukung kegiatan kantor Diskominfo selama 1 tahun.

b. Sub kegiatan penyediaan bahan bahan logistik kantor

Sub Kegiatan ini mengakomodir penyediaan makanan dan minuman pendukung kegiatan / rapat – rapat kantor dan kegiatan lainnya pada Diskominfo Kab. Barito Kuala

c. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub Kegiatan ini mengakomodir penyediaan bahan cetak (cetak cover, blanko-blanko) serta penggandaan surat-menyurat pendukung kegiatan kantor Diskominfo

d. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Sub kegiatan ini mengakomodir penyediaan alat-alat listrik lampu dll untuk penunjang kantor diskominfo

e. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini mengakomodir biaya penyelenggaraan koordinasi Kepala Diskominfo baik ke luar daerah dalam Provinsi maupun keluar daerah luar provinsi

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub Kegiatan ini merupakan peningkatan kemampuan Pegawai dengan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

b. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan untuk peningkatan pemahaman, kesadaran, ketaatan, dan partisipasi dalam pelaksanaan kinerja

- c. Sub kegiatan Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan ini Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan penugasan ASN dalam mengikuti pelatihan- pelatihan dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

5. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini merupakan pengadaan Kendaraan Dinas operasional untuk mendukung kinerja SKPD

- b. Sub kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan mebel meja/kursi rapat pimpinan, meja/kursi media center pimpinan, meja/kursi staf dll

- c. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Sub kegiatan ini mengakomodir Sub Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan peralatan dan mesin seperti komputer, laptop, printer dll

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan terkait pelayanan kantor Diskominfo penyediaan alat kebersihan dan bahan

pembersih, penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor dan JKK/JKM Non /ASN

b. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Sub Kegiatan ini mengakomodir penyediaan jasa surat menyurat seperti penyediaan materai biaya pengiriman surat dan tenaga harian lepas

c. Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Sub Kegiatan ini mengakomodir langganan Listrik, PDAM, Telepon dan Internet kantor Diskominfo

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan ini mengakomodir kebutuhan perawatan kendaraan dinas operasional / lapangan, kebutuhan perpanjangan STNK serta kebutuhan BBM operasional pimpinan

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini melaksanakan Pemeliharaan perarlatan mesin aset Diskominfo seperti servis komputer, laptop, printer, AC dll.

c. Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub Kegiatan ini mengakomodir kebutuhan perawatan gedung kantor serta penyediaan tenaga keamanan.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor seperti listrik, air, telepon dll.

2. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan Koordinasi penempatan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Di Pusat Data Nasional

b. Sub Kegiatan pelaksanaan Manajemen SPBE

Sub Kegiatan ini melaksanakan koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan ini melaksanakan pengelolaan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien dadalam mendukung pelaksanaan tugas

d. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Sub Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengelolaan aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE

e. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet

Sub Kegiatan ini pemenuhan ketersediaan kapasitas bandwidth.

Koneksi internet/ Bandwidth tersebut disharing ke 30 SKPD, 17 Kecamatan, 6 Kelurahan, 120 Desa, server aplikasi dan beberapa Free Wifi. berlangganan Koneksi internet implementasi e-Gov, Sewa 8 IP Publik, Sewa Peralatan Jaringan (Hosting dan cPanel), pemeliharaan

Jaringan e-Gov untuk 17 Kecamatan dan 6 Kelurahan dan Jasa Pendukung Tenaga Ahli 10 orang (6 orang untuk tenaga ahli jaringan dan 4 orang untuk tenaga ahli database / sistem informasi. Jasa Pendukung Tenaga Ahli diperlukan sebagai Tenaga Support IT untuk seluruh Jaringan e-Gov di Kabupaten Barito Kuala.

- f. Sub kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan ini dilaksanakan koordinasi dalam penyusunan, analisis, pengujian rencana SPBE. Untuk meningkatkan efektifitas, efisien, kualitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pengembangan SPBE

2. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Sub kegiatan ini melaksanakan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa terdiri dari 1 domain yaitu baritokualakab.go.id dan 20 sub domain. Serta penyediaan tenaga ahli. Sub kegiatan ini juga sebagai salahsatu kegiatan penunjang untuk sektor pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional

Koordinasi dan sikronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral

Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka publikasi melalui Buku/Dokumen Statistik Sektoral. Penyusunan

Buku/Dokumen merupakan kegiatan kompilasi data statistik sektoral dari SKPD melalui Rumah Data Batola

b. Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia

Sub kegiatan ini untuk pencapaian keseragaman dan keselarasan data di seluruh indonesia, data yang akurat, konsistensi integritas, ketersediaan dan keamanan dengan pengembangan sistem, pengumpulan data, pengolahan data, pengawasan an evaluasi pengelolaan untuk memastikan prinsip satu data terpenuhi

c. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

Sub kegiatan ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang dihasilkan oleh berbagai lembaga statistik dan instansi pemerintah,

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Sub kegiatan ini melaksanakan Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah untuk pengelolaan peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi Data Prioritas Daerah dan Peningkatan Data yang di rekomendasikan

e. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Sub kegiatan ini dilaksanakan guna menghasilkan data statistik sektoral yang akurat, konsisten dan relevan dengan melaksanakan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian data serta pengawasan dan evaluasi

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sub kegiatan ini melaksanakan upaya untuk melindungi informasi pemerintah daerah dari ancaman keamanan yang

daapat mengganggu integrritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi

- b. Sub kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan

Sub kegiatan ini merupakan proses pengelolaan sumberdaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik dan efisien dengan melaksanakan analisis sumberdaya yang diperlukan yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, serta sumberdaya anggaran

- c. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini melaksanakan upaya untuk melindungi informasi pemerintah daerah dari ancaman keamanan dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dan digunakan dengan nama aman dan efektif, dengan melaksanakan pengamanan jaringan , pengamanan aplikasi, pengamanan data, pengamanan identitas

- d. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Sub kegijaaatan ini proses penetapan kebijakan yang jelas dan efektif untuk mengelola keamanan informaasi dan persandian pemerintah daerah yang mengatur pengelolaan keamanan informasi pemerontah daerah, kebijakan yang mengatur akses informasi pemerintah daerah, dan kebijakan

yang mengatur pengelolaan resiko keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah

- e. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini Penyediaan Pelayanan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antara Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan ini merupakan proses pelaksanaan keamanan informasi dan persandian yang ditetapkan untuk mengamankan informasi dan persandian pemerintah daerah dengan langkah mengembangkan prosedur operasional layanan keamanan, mengalokasikan sumber daya, mengatur akses informasi serta pengawasan dan evaluasi operasionalisasi layanan keamanan dan persandian

5. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Sub kegiatan ini melaksanakan sosialisasi, pelatihan, bimtek, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang informasi yang akurat dan terkini, dengan Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo

- b. Sub kegiatan Pelayanan informasi publik

Sub kegiatan ini melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat, Rakor SP4N LAPOR!, Rakor PPID, Jemput bola pengaduan masyarakat serta pelaksanaan jumpa pers pemerintah daerah, Bimtek SP4N LAPOR!,

c. Sub kegiatan Pengelolaan media komunikasi publik

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik melaksanakan pengelolaan media informasi pemerintah daerah dan melaksanakan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan online kegiatan ini melaksanakan publikasi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat. Sub kegiatan ini juga merupakan kegiatan pendukung/ penunjang penurunan angka stunting

d. Sub kegiatan penyusunan konten

Sub kegiatan ini melaksanakan penyusunan konten informasi publik melalui Tabloid Batola Membangun media cetak pemerintah daerah

e. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan peningkatan Sumber daya pengelolaan Informasi dan komunikasi dengan melaksanakan Bimtek/pelatihan Jurnalistik Bagi ASN

Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun rencana :

Jumlah program	:	5 program
Jumlah kegiatan	:	13 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	:	44 Sub kegiatan
Pagu indikatif	:	Rp. 13,000,597,461.00
Pagu indikatif APBN/TP	:	-
Pagu indikatif APBN/DAK	:	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Kerja Program dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala Tahun 206 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026

No	SEBELUM PEMUTAKHIRAN (NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA KEPMEN 1350 PEMUTAKHIRAN 240115_1350	SETELAH PEMUTAKHIRAN (NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA KEPMEN 3406 PEMUTAKHIRAN No 900.1.15.5- 3406_Tahun_2024_476_1	Pagu Indikatif (Rp)
	Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	4,822,632,473.00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	107,393,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDs	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102,393,500.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3,162,375,771.00
	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,073,297,271.00
	Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	89,078,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	123,207,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48,069,000.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27,069,000.00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,069,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	416,744,077.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,154,090.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	17,932,250.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,375,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,304,100.00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351,132,727.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201,782,350.00
	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00
	Pengadaan mebel	Pengadaan Mebel	9,791,550.00
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141,990,800.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171,611,775.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,000,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129,050,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15,561,775.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	639,518,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,148,000.00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,900,000.00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,470,000.00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500,000,000.00
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,898,403,388.00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,898,403,388.00
	Penguatan	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	115,362,190.00
	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	59,014,224.00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3,308,137,750.00
	Penyusunan Konten	Penyusunan Konten	349,589,824.00
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	66,299,400.00
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3,738,000,000.00
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	115,000,000.00

	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	115,000,000.00
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,623,000,000.00
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	66,000,000.00
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	203,300,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	362,960,000.00
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	153,900,000.00
		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	164,040,000.00
		Penyediaan Akses Internet	2,672,800,000.00
		Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6,000,000.00
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6,000,000.00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	6,000,000.00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	220,953,050.00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	220,953,050.00
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	65,735,750.00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	23,080,000.00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	78.097.300.00
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	23,080,000.00
		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	30,960,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	314,608,550.00
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	282,954,800.00

		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	107,279,350.00
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	96,215,200.00
	Penyediaan Layanan Keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	46,086,500.00
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	33,373,750.00
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	31,653,750.00
	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	31,653,750.00
			13,000,597,461.00

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam penyusunan dan penetapan program dan kegiatan pembangunan difokuskan untuk meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 dan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas

Untuk memperoleh pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka sinkronisasi antar kegiatan antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta pembagian urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang ada.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 maka Penyusunan Rencana Kerja (program – kegiatan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Dalam dokumen RKPD 2025 melampirkan Pemutahiran sub kegiatan dari ke KEPMEN 240115_1350 ke KEPMEN No_900.1.15.5-3406_Tahun_2024_476_1
- b. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan berbagai sumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra SKPD).

- c. Dengan adanya dokumen ini dapat digambarkan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk mencapai target indikator. Jumlah program kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 ada 5 program, 13 kegiatan 44 sub kegiatan dengan jumlah pagu **Rp. 13,000,597,461.00**

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, sehingga kualitas perencanaan semakin baik dengan mengikuti bimtek, pelatihan serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- d. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat selain sosialisasi dan publikasi hasil pembangunan serta kebijakan Pemerintah Kabupaten bahwa pentingnya memiliki ijin-ijin, agar terwujudnya ketertiban umum, baik administrasi maupun non administrasi
- e. Melakukan pengawasan di lapangan serta mengadakan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat termasuk sekolah-sekolah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- f. Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia di samping itu untuk meminimalkan kendala yang dihadapi maka jalan yang akan ditempuh antara lain:
 - a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif dan efisien
 - b. Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara tepat
 - c. Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan
 - d. Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Marabahan, 3 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA



HERY SASMITA, S.STP., M.AP.
NIP. 19840220 200312 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Nomor 74 Telp.0511-6701895 Fax. 0511- 6701255
Marabahan Kalimantan Selatan 70513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR: 555/033/Set-Diskominfo/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan;
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk:
- Menghimpun bahan-bahan penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala 2026;
 - Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
 - Melaksanakan Forum Koordinasi Lintas SKPD dalam rangka penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan dengan komponen RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD Kabupaten Barito Kuala;
 - Menetapkan target indikator kinerja program tahun 2026 dan,
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS,



HERY SASMITA, SSTP. MAP
NIP. 19840220 200312 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Barito kuala
Nomor : 555/033/Sekr-Diskominfo /2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025**

No	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
5.	Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
6.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
8.	Fungsional / Analis/ Pranata Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota	
9.	Fungsional/ Analis/ Pranata Pada Bidang Layanan E-Government	Anggota	
10.	Fungsional/ Analis/ Pranata Pada Bidang Statistik dan Persandian	Anggota	
11.	Pengelola Sistem dan Jaringan (Prio Satriadi, A.Md)	Anggota	
12.	Pengelola Informasi Teknologi Informasi (Ani Nourmala, A.Md.Kom)	Anggota	



KEPALA DINAS,

HERY SASMITA, SSTP. MAP
NIP. 19840220 200312 1 001